

## DINAMIKA SOSIAL PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DI INDONESIA

**Ahmad Adib Rofuddin**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia  
[adibudin08@walisongo.ac.id](mailto:adibudin08@walisongo.ac.id)

**Abstrak:** Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia selalu menjadi perhatian masyarakat Islam Indonesia khususnya pada bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah karena tiga bulan tersebut sering mengalami perbedaan. Fenomena ini berbeda jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei yang cenderung memiliki keputusan bulat dalam penentuan awal bulan Hijriah. Tulisan ini mencoba untuk melihat fenomena tersebut dalam perspektif Pierre Bourdieu melalui Teori Habitus dan Teori Modal yang mempunyai pengaruh kuat dalam dinamika sosial di masyarakat. Merujuk pada teori tersebut, Dinamika Penentuan Awal Bulan Hijriah merupakan sebuah pertarungan modal antar ormas-ormas Islam Indonesia yang meliputi modal sosial, ekonomi, budaya dan simbolik meskipun Kementerian Agama RI telah menggunakan kriteria imkanurrukyat sebagai jalan tengah atas perbedaan yang ada. Selain itu, adanya terminologi Madzhab Hisab dan Madzhab Rukyat dalam wacana kalender Hijriah di Indonesia menunjukkan adanya simbol-simbol kekuasaan yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan simbolik diantara kedua madzhab tersebut.

**Kata Kunci:** *Kalender Hijriah, Habitus, Modal, Kekerasan Simbolik*

**Absrtact:** *Determination of the beginning Hijri Month in Indonesia has always been a concern for Indonesian Moeslim society, especially during Ramadhan, Shawwal and Dhulhijjah. Those three months often run into differences. It is different when compared to countries like Malaysia and Brunei that have unanimous decision in determining it. This article aims to look the phenomenon in the perspective of Pierre Bourdieu through Habitus Theory and Capital Theory on social dynamics society. Related to that theory, the dynamics of determination the beginning of Hijr month is capital contestation between Indonesian Islamic mass organizations that include social, economic, cultural and symbolic capital. The Ministry of religion affairs has used the imkanurrukyat criteria as a middle way to mediate the differences. Moreover,*

*the presence possibility of terminology HisabMadzhab and RukyatMadzhab in Hijri calendar will cause symbolic violence between these two Madzhab.*

**Keyword :** *Hijri calendar, Habitus, Capital, Symbolic Violence*

---

## A. Pendahuluan

Kalender merupakan sebuah sistem pengorganisasian untuk menghitung waktu dalam periode tertentu. Melalui Kalender, manusia mampu menandai setiap peristiwa yang ada dalam lintasan sejarah kehidupannya maupun kehidupan sebuah bangsa. Oleh karena itu, kalender memegang peranan penting dalam perkembangan kehidupan manusia dan peradaban<sup>1</sup>. Jika dikonversikan, maka unit terkecil dari kalender adalah hari yang terdiri dari jam, menit dan detik. Terkait dengan Kalender, Astronomi menjadi hal hal yang mutlak dalam penentuannya. Hampir seluruh sistem sistem Kalender yang ada di dunia mengacu kepada siklus astronomi meskipun ada beberapa kalender yang hanya berdasarkan pada sebuah aturan abstrak dan hanya mengikuti sebuah sistem yang berulang tanpa memiliki arti secara astronomis. Ada kalender yang dikode berdasarkan hukum tertulis, tetapi ada juga yang disampaikan melalui pesan-pesan oral<sup>2</sup>. Sampai saat ini, diperkirakan ada sekitar 40 macam model kalender yang digunakan di muka bumi dan pada setiap sistem kalender mempunyai cara penentuan yang berbeda sesuai dengan acuan yang digunakan<sup>3</sup>. Dari 40 macam kalender tersebut, semuanya mempunyai anomali yang dipengaruhi oleh beberapa faktor pada masing-masing kalender<sup>4</sup>.

Secara umum, sistem kalender yang digunakan di seluruh dunia berbasis pada pergerakan benda langit, khususnya pergerakan bulan mengelilingi matahari (revolusi bulan) dan pergerakan semu matahari. Berdasarkan pergerakan kedua benda langit tersebut, sistem kalender di dunia dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok sistem perhitungan. *Pertama*, adalah Kalender Masehi atau Kalender Kristen. Kalender ini adalah sistem kalender yang menjadikan pergerakan matahari sebagai acuan perhitungannya (*syamsiyah* atau *solar system*). Karena berdasarkan

---

1 Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*. (Jakarta: Amhytas Publicita, 2007), 47.

2 S. Segan, "Uncertainties and Misconcepts About Calendars: A Project of A Non-Historical Calendar", *Publication of Astronomical Observation Belgrade*. No 80. 2006. 233-234. Di dalam artikel ini juga disebutkan bahwa kalender non-astronomi cenderung bermasalah pada beberapa tahun setelahnya.

3 Al-Modarresi, S.M.T. & N.M. White, "Calendar Conversion for Real-time Systems", *Journal of Advances in Engineering Software*, Vol 35, 7 (Juli 2004), 511-516

4 Sebagai contoh adalah Kalender Maya yang mempunyai *trouble* setiap 0,2442 detik per hari. (Bardin, The Amazingly Accurate Calendar System of The Maya Indians, *Journal of Scientific American University of Virginia*, November 1925, 312-315. Begitu juga dengan Kalender Yahudi kuno yang mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial dan keagamaan. Huttenbach, Henry R, The Reconstruction and Evaluation of A Social Calendar As Primary Source for The History of The Jewish Community of Worms, *Journal of World Union of Jewish Study*, Juni 2014, 367-397.

pada pergerakan matahari, maka kalender ini secara otomatis akan sesuai dengan musim yang terjadi di belahan dunia. *Kedua*, adalah kalender bulan atau *lunar calendar* yang berbasis pada pergerakan bulan selama mengorbit (berevolusi) terhadap bumi. Kalender Hijriah adalah satu-satunya sistem Kalender yang masing menggunakan model ini. Kalender ini murni mengikuti siklus fase bulan tanpa ada keterkaitan dengan pergerakan matahari. Karena hanya berbasis pada pergerakan bulan, maka Idul Fitri yang diperingati pada tahun 2019 atau 1440 H di Indonesia berada pada musim kemarau, sementara Idul Fitri pada tahun 1999 M atau 1420 H dirayakan pada musim hujan. Hal ini sebagai konsekuensi dari sistem Kalender yang tidak mempertimbangkan pergerakan matahari sedikitpun. Sistem Kalender *ketiga* adalah Kalender *luni-solar*. Kalender ini berusaha untuk menambal kekurangan yang dimiliki oleh kalender bulan yang tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan musim di berbagai kawasan. Penyesuaian dilakukan dengan menambahkan 7 bulan sisipan (*intercalary months*) dalam siklus 19 tahun. Dengan demikian, hari-hari besar yang ada pada sistem ini akan selalu sesuai dengan perubahan musim meskipun menggunakan basis pergerakan bulan pada perhitungannya. Contoh Kalender ini adalah Kalender Cina dan Kalender Yahudi<sup>5</sup>.

Seluruh umat Islam sepakat bahwa Kalender Hijriyah digunakan sebagai acuan dalam penentuan ibadah utamanya untuk Puasa, Idul Fitri dan Haji. Dalam lintasan sejarah, kalender ini pertama kali ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai kalender resmi negara pada tahun 642 M atau 10 tahun setelah Nabi Muhammad wafat dan tanggal 16 Juli 622 M ditetapkan sebagai hari pertama dalam Kalender Hijriyah yang merujuk pada peristiwa Hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Namun, penggunaan Kalender ini sudah diumumkan oleh Nabi Muhammad beberapa saat sebelum beliau wafat<sup>6</sup>. Kalender ini dibentuk berdasarkan revolusi bulan terhadap bumi. Karena berdasarkan peredaran bulan, maka dalam penentuan awal bulannya sering terjadi perbedaan yang disebabkan oleh penggunaan metode penentuan yang berbeda yakni metode rukyat, metode hisab dan imkanurrukyat<sup>7</sup>.

---

5 Abdul Salam Nawawi, *Ilmu Falak*. (Surabaya: Aqoba Press, 2010), 25. Baca juga di Alan Longstaff, *Calendars from Around the World*, (London: National Maritime Museum, 2005), 7.

6 Leong Wen Xin, *Lunar Visibility and the Islamic Calendar*. (Singapore: National University of Singapore, 2001), 10.

7 Kalender ini mulai dipakai oleh masyarakat Babilonia Kuno yang menggunakan pengamatan bulan baru dengan mata telanjang. Syarat datangnya bulan baru bagi masyarakat Babilonia adalah umur bulan lebih dari 24 jam dan jarak terbenamnya matahari dan bulan lebih dari 48 menit. Setelah itu, banyak astronom Islam yang mulai mengembangkan kriteria mereka dan belajar tentang masalah kriteria awal bulan baru seperti: Ibn Thariq, Habash, al-Khawarizmi, al-Khazin, al-Thabari, al-Fahhad, al-Farghani, Thabet bin Qurrah, al-Battani, Ibn Maimon, al-Biruni, al-Sufi, Ibn Sina, at-Tusi, dan al-Kashani. Mohammad sh. Odeh. "New Criterion for Lunar Crescent Visibility", *Journal of Experimental Astronomy* 18. 2004. 39-64.

Penyatuan Kalender Hijriyah merupakan isu yang terus bergulir menjelang datangnya bulan suci Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Hal ini bisa dimaklumi mengingat pada ketiga bulan tersebut, umat Islam membutuhkan sebuah kepastian karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Puasa Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Haji. Hal ini menunjukkan bagaimana penentuan kalender Hijriyah memiliki posisi strategis sebagai sebuah kebutuhan umat Islam dalam menjalankan ibadah. Karena penyatuan kalender ini menyangkut permasalahan ibadah dan membutuhkan Ilmu Astronomi sebagai alat bantu, maka masalah ini menjadi kajian aktual setiap tahunnya seiring dengan perkembangan keilmuan astronomi.

Wacana penyatuan Kalender Hijriyah ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan keilmuan astronomi itu sendiri. Perkembangan wacana ini pada akhirnya juga sampai ke Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Wacana kalender Hijriyah yang berkembang di Indonesia menjadi sorotan dunia Islam dan menjadi menarik untuk dikaji karena adanya dua organisasi massa besar, yakni Muhammadiyah dan NU<sup>8</sup>, yang seringkali disimbolkan sebagai sumber perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriyah dimana NU menganut madzhab rukyat sementara Muhammadiyah menganut madzhab hisab.<sup>9</sup> Adanya dikotomi semacam ini sering menyebabkan konflik horizontal yang mengakibatkan ketegangan di antara umat Islam menjelang datangnya ketiga bulan Hijriyah tersebut. Bahkan, ketegangan yang terjadi pada tahun 1969 sampai kepada ketegangan teologis yang menimbulkan perpecahan dan jatuhnya korban jiwa<sup>10</sup>. Selain kedua ormas besar Islam tersebut, wacana Kalender Hijriyah di Indonesia juga diwarnai oleh pemikiran dari gerakan Islam Transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)<sup>11</sup> yang menggunakan metode *rukyatul hilal* global sebagai

---

8 Muhammadiyah sering disebut organisasi yang mewadahi umat Islam modernis sementara NU dicitrakan sebagai organisasi kaum tradisional. Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan yang terinspirasi oleh tokoh reformis Islam Muhammad Abduh dan anggotanya banyak tersebar di Jawa dan mempunyai pengaruh kuat di Pulau Sumatra. Sedangkan NU didirikan oleh Wahab Hasbullah dan Hasyim Asy'ari untuk melindungi Islam Tradisional dan Pesantren dari gerakan modernis. Donald J Porter, *Managing Politics and Islam in Indonesia* (New York and London: RoutledgeCurzon, 2002), 39-40; sementara itu, Michael Feener menyebutkan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi Islam Modern dimana pengikutnya tersebar mulai dari kalangan bawah sampai atas, sementara NU merupakan organisasi Islam tradisional dimana pengikutnya pada saat itu lebih sedikit. Michael Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*, (New York: Cambridge University Press, 2007), 17-18.

9 Madzhab Rukyat secara institusional diidentikkan dengan NU sementara Hisab diidentikkan dengan Muhammadiyah. Adanya dikotomi antara dua organisasi inilah yang pada akhirnya memunculkan konflik di tengah masyarakat Muslim Indonesia meskipun pada kenyataannya konflik yang terjadi hanya pada level lahiriyah semata dan tidak sampai menyentuh pada tataran konflik secara substansial. Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 91-92. Lihat juga Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 4-8.

10 Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, 5-6.

11 HTI merupakan salah satu bagian dari gerakan Internasional Hizbut Tahrir sebagai gerakan modernis Islam yang mengusung ideologi khilafah dalam pandangan politiknya. HTI pertama kali didirikan oleh Syaikh Taqiuddin an-Nabhani pada

penentu awal bulan Kamariah<sup>12</sup>, PERSIS (Persatuan Islam)<sup>13</sup> yang menggunakan sistem Hisab yang hampir sama dengan Muhammadiyah, namun sedikit berbeda dalam urutan penggunaannya<sup>14</sup>.

Fenomena sebaliknya terjadi di negara tetangga yang mayoritas penduduknya Islam, Malaysia dan Brunei Darussalam, yang sudah memberikan pedoman baku dalam menyikapi perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah ini. Malaysia dalam penentuan awal bulan Hijriyah menggunakan metode Hisab dan Rukyat namun keputusan akhir berada di tangan pemerintah dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara, sementara Brunei Darussalam hanya menggunakan metode rukyat semata dan hal ini pun wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara.<sup>15</sup> Kondisi tersebut jelas berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Meskipun sudah ada mekanisme atau standar acuan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun masyarakat tetap dibebaskan untuk mengikuti acuan yang mereka yakini meskipun menimbulkan perbedaan dengan ketetapan pemerintah. Hal ini diklaim sebagai sebuah kebebasan di alam demokrasi yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berekspresi dalam menyuarakan pendapat mereka masing-masing.

Dalam menganalisis dinamika sosial ini, penulis menganggap teori *habitus* Pierre Bourdieu relevan dan sesuai dengan konteks yang ada. Konsep Habitus, Field, Modal (*Capital*), dan Kekerasan Simbolik merupakan pokok-pokok pemikiran Bourdieu dalam memahami dinamika sosial masyarakat yang kiranya relevan dengan dinamika sosial Kalender Hijriah ini. Sebagai batasan, penulis akan melihat dinamika sosial Kalender Hijriah dalam kurun waktu 30 tahun antara tahun

---

tahun 1953 di Jerusalem dan berpusat di London sejak tahun 1980-an sampai sekarang. Gerakan ini mulai masuk di Indonesia pada era Orde Baru tahun 1987 dan memusatkan kegiatannya pada kampus-kampus ternama di Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Di Asia Tenggara, gerakan ini juga berkembang di Malaysia dan menamakan dirinya Hizbut Tahrir Malaysia (HTM). Michael Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*, 2015-217. Baca juga Joseph Chinyong Liow, *Piety and Politics: Islamism in Contemporary Malaysia*, (New York: Oxford University Press, 2009), 136-138.

12 Dalam pandangan HTI, rukyatul hilal bukanlah rukyat lokal yang berlaku untuk satu *mathla'* (madzhab Syafi'i) namun rukyatul hilal yang dilakukan di salah satu negara muslim dan berlaku untuk kaum muslim di seluruh dunia (Madzhab Maliki, Hanafi dan Hambali). M. Shiddiq al-Jawi, Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia, *makalah*, disampaikan dalam Seminar Nasional bertema "Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Merajut Ukhuwah di tengah Perbedaan", 27-30 November 2008. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

13 Persis merupakan organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1923 sebagai representasi dari Islam modernis sebagaimana Muhammadiyah dan Serikat Islam. Selengkapnya lihat di Donald J Porter, *Managing Politics and Islam in Indonesia*, 39.

14 Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah menggunakan imkanurrukyat, ijtima qobla ghurub kemudian hisab wujudul hilal, sedangkan PERSIS dalam urutannya menggunakan ijtima' qobla ghurub, wujudul hilal (1996) dan Imkanurrukyat (2002). Selengkapnya baca di Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia melalui Kalender Islam," *jurnal Ahkam XV*, no 2, (Maret 1994), 28-34

15 Mohd Syukri Hanapi & Shahir Akram Hassan, "Basis for Using Rukyah Method for Determining the Arrival of Ramadhan and Syawal in Brunei Darussalam". *Journal of Islamic Studies and Culture* 3 no 2 (Desember 2015): 13-15.

1985 sampai dengan 2015. Selain itu, ormas Islam yang dianalisis adalah NU dan Muhammadiyah serta ada sedikit tambahan dari ormas Persis dan Islam Aboge.

## B. Dinamika Sosial dalam Perspektif Pierre Bourdieu

Dinamika Sosial, menurut Gillin dalam Abdulsyani, dapat dipahami sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima. Perubahan-perubahan itu terjadi baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Dalam melakukan studi tentang dinamika sosial, maka harus dilihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi obyek yang menjadi perhatian studi, dan kemudian dilihat dari konteks waktu yang berbeda<sup>16</sup>. Lembaga kemasyarakatan umumnya merupakan saluran utama dalam suatu dinamika sosial. Perubahan pada lembaga masyarakat pada akhirnya akan membawa akibat pada lembaga yang lain dan oleh karenanya lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan merupakan suatu bangunan dengan pola-pola dan keseimbangan tertentu. Talcott Parson sebagaimana dikutip oleh Alexander Stingl<sup>17</sup> mengungkapkan bahwa masyarakat terintegrasi akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu atas dasar kesepakatan dari para anggotanya dan mempunyai kemampuan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Pierre Bourdieu dalam memahami Dinamika Sosial.

Pierre Bourdieu mempunyai pengalaman yang panjang dalam kehidupan masyarakat sosial Prancis sebagai kelompok yang didominasi dan kemudian mampu meningkatkan status sosialnya melalui pendidikan yang pada akhirnya mampu membuka segi-segi kehidupan sosial yang tidak dilihat oleh intelektual lain. Bourdieu menggunakan cara berfikir relasional dimana struktur objektif dan representasi subyektif, agen dan pelaku terjalin secara dialektis dan saling mempengaruhi secara timbal balik. Hubungan keduanya tidak terjadi berlawanan melainkan terjadi secara dialektis dan saling mempengaruhi dalam praktik sosial. Hal ini merujuk pada dua hal mendasar, *pertama*, praksis sosial merupakan interaksi dialektis antara struktur dan pelaku dan *kedua*, praksis sosial ini terjadi pada dimensi ruang dan waktu. Dari kedua hal mendasar ini, maka muncul istilah *habitus*<sup>18</sup>.

---

16 Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 163.

17 Alexander Stingl, *The Biological Vernacular from Kant to James, Weber and Parson*, (Lampeter: Mellen Press, 2009), 54-70.

18 Fauzi Fashri, *Pierre Bourdieu, Mengungkap Kuasa Simbol*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2014), 64-67.

Menurut Bourdieu, *Habitus* merupakan keterampilan yang menjadi tindakan praktis yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu<sup>19</sup>. *Habitus* juga bisa diartikan sebagai struktur atau kognitif yang menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial<sup>20</sup>. Dalam kaitannya dengan agama, Bourdieu mendefinisikan *habitus* sebagai ukuran spesifik keagamaan seseorang yang diwujudkan secara nyata secara tidak eksklusif dalam praktik keagamaan<sup>21</sup>. Bourdieu mengungkapkan adanya *habitus* ini akan membedakan kelas di antara masyarakat dalam lingkup sosial yang pada akhirnya akan mewujudkan kecenderungan sikap individu atau kelompok yang dalam persaingan untuk saling mendominasi.

Dalam memahami sebuah masyarakat, Bourdieu menggunakan instrumen utama berupa konsep *habitus* dan *field* serta strategi untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan.<sup>22</sup> Bourdieu menggambarkan bahwa dalam masyarakat, yang digambarkan sebagai arena perjuangan (*field*), selalu ada hubungan antara yang menguasai dan dikuasai. Kekuasaan ini sangat bergantung pada situasi, sumber daya dan strategi pelaku. Dalam arena perjuangan ini, penentuan pihak yang berkuasa berdasarkan pada dua dimensi; *pertama*, menurut besarnya modal (kapital) yang dimiliki dan, *kedua*, adalah bobot atau komposisi modal yang mereka miliki<sup>23</sup>.

Paul Bonnewitz, sebagaimana dikutip oleh Haryatmoko, menjelaskan bahwa konsep kapital ini sebenarnya merupakan konsep yang dipakai dalam ilmu ekonomi. Namun oleh Bourdieu digunakan untuk menjelaskan adanya relasi dalam dunia sosial karena ada tiga alasan; *pertama*, kapital terakumulasi melalui investasi dan, *kedua*, kapital bisa diberikan kepada yang lain melalui warisan serta *ketiga*, kapital dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sesuai dengan kesempatan yang diberikan dalam kekuasaan<sup>24</sup>. Di dalam wacana keagamaan, Bourdieu memilah modal ini dalam dua bentuk, yakni dalam bentuk sistem simbol agama dan kemampuan dalam memahami ajaran-ajaran agama.<sup>25</sup> Oleh karena itu, adanya

19 Sebagaimana dikutip dari Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), 40-41.

20 George Ritzer, *Modern Sociological Theory, Seventh Edition*, (California: McGraw Hill Education, 2007), 482-483.

21 Terry Rey, *Bourdieu on Religion: Imposing Faith and Legitimacy*, (London and New York: Routledge, 2007), 92.

22 Haryatmoko, *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa*. (Majalah BASIS nomor 11-12 Tahun ke-52, November-Desember, 2003), 9.

23 Pierre Bourdieu, *La distinction. Critique sociale de judgement*. (Paris: Minuit, 1979), 127.

24 P Bonnewitz, *Premieres lecons sur la sociologique de Pierre Bouedieu*, (Paris: P.U.F., 1998) sebagaimana dikutip oleh Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian*, 44-45. Lihat pula tulisan Pierre Bouedieu, *The Forms of Capital* dalam *Handbook of Theory of Research for The Sociology og Education*, ed Richardson, (Connecticut: Greenwood Press, 1986), 46-47.

25 Bourdieu mencontohkan bagaimana Gereja mengatur keuangannya dengan memberikan kebutuhan siraman rohani kepada jamaah gereja yang pada akhirnya mereka akan memberikan eumbangan berupa uang dalam jumlah besar untuk gereja. Semakin baik produk keagamaan yang diberikan akan semakin banyak pula uang yang terkumpul. Terry Rey, *Bourdieu on Religion: Imposing Faith and Legitimacy*, (London and New York: Routledge, 2007), 94-95.

kapital ini memberikan keleluasaan kepada pemilik kekuasaan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam arena perjuangan (*field*) tidak hanya dalam masalah ekonomi namun juga dalam interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh kongkrit adalah jalan raya sebagai arena perjuangan dan kendaraan merupakan modal atau kapital yang dimiliki oleh seseorang. Maka bisa dipastikan bahwa kendaraan dengan ukuran dan mesin yang terbaiklah yang akan menguasai jalan raya seperti bus dan kendaraan bergengsi lainnya. Sedangkan kendaraan dalam ukuran kecil dan mesin yang pas-pasan harus rela mengalah ketika bis dengan kecepatan tinggi lewat.

Konsep Kapital ini dijadikan Bourdieu dalam memberikan pemahaman terkait dengan kekuasaan yang ada dalam dunia sosial sesuai dengan komposisi dan jenis kapital yang digunakan. Ia kemudian membedakan jenis-jenis kapital ke dalam empat macam; *Pertama*, Kapital Ekonomi. Kapital/modal ekonomi ini merupakan modal yang bersumber dari sektor finansial serta sumber daya yang dimiliki oleh penguasa<sup>26</sup>. Jika kapital ini dimiliki oleh penguasa, maka kapital-kapital yang lain akan mudah untuk ditaklukkan. *Kedua*, Kapital Budaya. Kapital budaya merupakan kapital yang bersumber pada pola kebiasaan yang dilakukan seseorang sehingga ia memiliki kelebihan dari orang lain<sup>27</sup>. Kapital ini dapat berupa ijazah, ilmu pengetahuan, cara berbicara, cara bergaul dalam interaksi sosial dan kelebihan-kelebihan lain sebagai hasil dari sebuah pembiasaan. *Ketiga*, Kapital Simbolik. Kapital simbolik ini merupakan sebuah pengakuan dalam kehidupan sosial<sup>28</sup> baik yang formal maupun informal seperti jabatan, nama marga keluarga, mobil mewah, status tinggi serta beberapa bentuk-bentuk pengakuan lain yang ada dalam masyarakat. *Keempat*, Kapital Sosial. Kapital sosial ini berhubungan dengan pola interaksi sosial (jaringan) yang digunakan untuk menentukan kedudukan sosial<sup>29</sup>.

Menurut Haryatmoko, kapital ekonomi dan kapital budaya-lah yang menempati posisi tertinggi dalam menentukan dalam memberikan kriteria diferensiasi dalam lingkup masyarakat yang sudah maju<sup>30</sup>. Artinya, seseorang yang mempunyai kemampuan finansial yang kuat dan/atau gelar pendidikan yang tinggi memiliki peluang yang lebih besar dalam memenangkan kompetisi untuk menjadi pihak yang dominan, dalam hal ini pemimpin.

---

26 Pierre Bourdieu, *Raison Pratiques. Sur la theorie de l'action*. (Paris: Seuil, 1994), 20,22, lihat pula Pierre Bouedieu, *The Forms of Capital*, 47.

27 Pierre Bourdieu, *Raison Pratiques*, 20-46 dan Pierre Bouedieu, *The Forms of Capital*, 47

28 Pierre Bourdieu, *Le sens Pratique*. (Paris: Minuit, 1980), 32.

29 Pierre Bourdieu, *Raison Pratiques*, 33. Lihat juga Pierre Bouedieu, *The Forms of Capital*, 47

30 Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, 45.

### C. Perkembangan Wacana Kalender Hijriah di Indonesia

Dalam lintasan sejarah, masyarakat Indonesia telah mengenal perhitungan kalender khususnya di Pulau Jawa dan dikenal dengan Kalender Saka atau sering disebut dengan Kalender Jawa Hindu. Kalender ini dimulai berdasarkan hari penobatan Prabu Syaliwahono (atau lebih dikenal dengan sebutan Aji Saka) yang bertepatan pada hari Sabtu, 14 Maret 78 M sebagai Raja India<sup>31</sup>. Pada perkembangannya, kalender ini juga digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali sebagai kalender Keagamaan dan kalender Adat. Seiring dengan masuknya pengaruh Islam ke Indonesia yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam pertama Samudera Pasai di Lhoksumawe, Aceh Utara, budaya Islam perlahan mulai masuk dan mempengaruhi masyarakat yang ada di wilayah Pulau Jawa. Dengan berdirinya kerajaan Mataram Islam di Jawa, Islam memperoleh kekuatan politik sehingga perkembangannya semakin efektif dan berpengaruh pada tata kehidupan masyarakat Jawa<sup>32</sup>. Salah satu pengaruh besar dalam pranata sosial masyarakat Jawa pada saat itu adalah perubahan sistem kalender dari Kalender Saka yang berpedoman pada pergerakan matahari ke Kalender Jawa Islam yang berpedoman pada pergerakan bulan. Penyesuaian kalender ini adalah bentuk akulturasi budaya yang dilakukan oleh Sri Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma sebagai Raja Kerajaan Mataram II yang berkuasa pada tahun 1613-1645 M. Perubahan sistem Kalender tersebut terjadi pada tahun 1633 M/1043 H bertepatan dengan tahun 1555 Saka. Namun demikian, permulaan tahun Jawa Islam tetap mengikuti/meneruskan perhitungan dari tahun Saka yakni dimulai pada angka 1555<sup>33</sup>.

Peralihan sistem dari kalender Jawa Hindu ke Kalender Islam sayangnya tidak diikuti dengan tradisi akademik berupa tulisan-tulisan (buku dan kitab) yang membahas tentang kalender Hijriyah<sup>34</sup>. Pada saat itu, umat Islam hanya diinstruksikan untuk pergi ke bukit-bukit atau pantai setiap tanggal 29 Sya'ban dan 29 Ramadhan untuk melakukan *Rukyatul Hilal* di ufuk barat saat matahari terbenam<sup>35</sup>. Jika hilal

31 Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik, (Perhitungan, Arah Kiblat, Waktu Sholat, Awal Bulan, dan Gerhana)*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 118.

32 Saifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 26-32.

33 Hariwijaya, *Islam Kejawaen*, (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2002), 237.

34 Di wilayah Singkil Aceh ditemukan sebuah naskah yang ditulis oleh Syaikh Abdur Ra'uf bin Fanshuri (w 1105 H/1693 M). Naskah ini sebenarnya tidak diberi judul oleh pengarangnya, namun secara keseluruhan naskah ini membahas tentang konversi penanggalan hijriyah, aplikasi tanggal dan nama-nama hari dalam kehidupan. Naskah ini terdiri dari 3 lembar bolak balik (6 halaman) dan tidak diketahui tahun penulisannya. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Mengenal Karya-Karya Ilmu Falak Nusantara: Transmisi, Anotasi dan Biografi*. (Yogyakarta: LKiS, 2017), 65-68. Menurut Penulis buku tersebut, naskah ini belum bisa dikatakan sebagai sebuah kitab karena naskah ini hanya berupa catatan seorang guru kepada murid-muridnya dan tidak diproduksi secara luas (tidak diterbitkan).

35 Jayusman, "Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia", *MADANIA* 2, Vol 18, (Desember 2014), 185-187.

bisa dilihat, maka malam itu merupakan malam tanggal 1 bulan baru, namun sebaliknya jika hilal tidak mampu dilihat maka malam bulan baru akan datang pada malam berikutnya.

Geliat perkembangan kajian tentang Kalender Hijriyah di Indonesia sebagai salah satu bidang kajian Ilmu Falak atau Astronomi Islam mulai terasa ketika banyak ulama Indonesia melakukan *rihlah ilmiah* ke Haramain dengan tujuan melaksanakan haji sekaligus menuntut ilmu selama bertahun-tahun disana. Periode awal abad 20 M merupakan titik pembaruan perkembangan Ilmu Falak di Indonesia. Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau (w 1915 M) adalah orang pertama yang memulai penulisan kitab dalam bidang ilmu falak yang berjudul *al-Qoul al-Mufid Syarh Mathla as-Said* sepulangnya dari rihlah ilmiah. Kitab ini merupakan kitab syarah dari kitab *al-Mathla as-Said* yang berisi tentang uraian teoritis-matematis-praktis tentang astronomi. Bersama dengan kitab *Zij Ulugh Bek* karya Astronom Muslim terkemuka Ulugh Bek (w 1449 M), kitab ini menjadi rujukan dalam karya-karya selanjutnya<sup>36</sup>. Dengan berpedoman terhadap kedua kitab ini, banyak karya-karya ulama Nusantara yang muncul dan mewarnai dinamika kalender Hijriah di Indonesia sampai saat ini<sup>37</sup>.

Perkembangan wacana Kalender Hijriyah ini juga diikuti oleh ormas Islam di Indonesia khususnya dalam penyusunan Kalender Hijriah. Dalam membuat sistem Kalender Hijriyah, masing-masing ormas menerapkan metode yang berbeda dan pada beberapa kasus juga berdampak kepada hasil perhitungan dan penetapan awal bulan Kamariah. Konsep *habitus* disini mempunyai peran cukup signifikan dalam menentukan metode penentuan Kalender Hijriyah dimana ormas NU menggunakan metode *rukyyat* sementara Muhammadiyah dan Persis menggunakan metode Hisab<sup>38</sup>.

Dari segi historis, penggunaan metode Rukyyat yang dilakukan NU bukan tanpa proses panjang. Proses tersebut dimulai sejak adanya Muktamar NU di Surabaya pada tanggal 8-13 September 1954 dan berlanjut pada muktamar Situbondo pada tahun

---

36 . Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Mengenal Karya-Karya Ilmu Falak Nusantara: Transmisi, Anotasi dan Biografi*, 3-10.

37 Beberapa karya muncul setelah mengadopsi kedua kitab tersebut adalah *Mukhtashar Mathla' as-Sa'id* karya Syaikh Jamil Djambek (w 1947 M), *Sullam an-Nayyirain fi Ma'rifah al-Ijtima' wa al-Kusufain* karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid Betawi (w 1968 M), *Tadzkirah al-Ikhwān fi Ba'dh Tawarikh al-'amal al-Falakiyyah bi Semarang; Natijah al-Miqat; Bulugh al-Wathar* karya Ahmad Dahlan Semarang. Pada perkembangan selanjutnya kitab-kitab yang muncul lebih teliti dalam perhitungan astronomi namun masih berdasarkan kepada dua kitab induk tersebut. Adapun kitab-kitabnya antara lain: *al-Khulashah al-Wafiyah* Karya Syaikh Zubair Umar al-Jailani (w 1990 M), *Ilmu Falak dan Hisab; Hisab Urfi dan Hakiki* karya Muhammad Wardan, *Badi'ah al-Mitsal* Karya Syaikh Ma'shum Jombang (w.1933 M), *Almanak Menara Kudus* karya Syaikh Turaikhan Adjuhri, *Nurul Anwar* Karya Syaikh Noor Ahmad SS, dan beberapa karya monumental lainnya yang masih berlandaskan pada kedua kitab pokok tersebut.

38 Thomas Djamaluddin, "Re-evaluation of Hilal Visibility in Indonesia", *Warta LAPAN* 2, no 4, Oktober 2000, 17-20.

1984 yang pada akhirnya memutuskan bahwa kaitannya dengan persoalan kalender Hijriyah, khususnya dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, NU mendasarkan pada rukyatul hilal dan istikmal<sup>39</sup>. Sedangkan metode hisab hanya dipakai sebagai pendamping metode rukyat dan bukan sebagai penentu utama terkait dengan Kalender Hijriyah<sup>40</sup>. Pada periode pra 1998, NU hanya menggunakan rukyat semata tanpa ada pembatasan kriteria dan hanya khusus digunakan untuk menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah<sup>41</sup>. Kemudian pasca 1998, NU mulai menggunakan hisab sebagai pendamping rukyat dan melaksanakan rukyat pada setiap pergantian bulan pada sistem Kalender Hijriah. Selain itu, laporan pengamatan hilal tidak serta merta diterima begitu saja melainkan harus diproses melalui Lajnah Falakiyah untuk kemudian diputuskan oleh pengurus pusat (PBNU).<sup>42</sup>

Sementara itu, Muhammadiyah memilih jalan yang berbeda dengan NU. Muhammadiyah cenderung menggunakan hisab sebagai metode dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Secara historis, penggunaan metode hisab ini pertama kali digunakan dalam almanak tahun 1927/1345 H dimana dalam almanak tersebut disebutkan Muhammadiyah menggunakan *hisab hakiki* dengan kriteria *Imkanurrukyat*. Selanjutnya, Muhammadiyah menggunakan metode *ijtima qobla ghurub* yang berpedoman bahwa bulan baru akan datang ketika *ijtima* (konjungsi) terjadi sebelum matahari terbenam. Teori ini digunakan Muhammadiyah sampai tahun 1937 M. Selanjutnya pada tahun 1938 M Muhammadiyah menggunakan metode *wujudul hilal* dan terus digunakan sampai sekarang. Penggunaan metode *wujudul hilal* ini pada akhirnya dijadikan metode utama Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Hijriyah sejak dikukuhkan dalam Seminar Falak Hisab Muhammadiyah pada tanggal 26-28 Agustus 1970<sup>43</sup>.

Sikap berbeda yang diambil oleh Muhammadiyah dengan menggunakan metode hisab ini berangkat dari interpretasi yang berbeda dengan umat Islam lainnya khususnya tentang dalil-dalil tentang rukyat. Muhammadiyah memahami bahwa perintah rukyat dan *istikmal* sebagaimana disebutkan dalam hadits.<sup>44</sup> Menurut

39 Ahmad, Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung, 2003), 94.

40 Hal ini sesuai dengan Pedoman Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang diinstruksikan oleh Pengurus Besar Nahdhatul Ulama. Selengkapnya baca Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdhatul Ulama*, (Jakarta: LF PBNU, 2006), 35-37.

41 Muh Ma'rufin Sudibyo, "Observasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24, no 1, April 2014, 12-20.

42 Sebagai contoh adalah laporan pengamatan hilal di Cakung pada penentuan bulan Syawal 1430 H dan Syawal 1432 H yang ditolak oleh PBNU karena pada saat itu daerah Cakung mengalami cuaca mendung dan bahkan hujan.

43 Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, 134-135.

44 "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab (berhitung). Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga

Rupi'i, hadits tersebut masih mengandung *illat* (kausa hukum) yakni keadaan masyarakat pada waktu itu masih *ummi* sehingga *illat* tersebut akan tereduksi seiring dengan perkembangan zaman<sup>45</sup>. Muhammadiyah beralasan bahwa dalam mengambil keputusan tersebut, lembaga ini berusaha untuk mempertautkan antara dimensi ideal wahyu dan peradaban manusia. Muhammadiyah mengembangkan nalar rasional-ilmiah yang menganggap bahwa hisab dinilai lebih rasional (pasti) dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>46</sup> Dengan adanya pengukuhan tersebut, maka metode Hisab ini juga menjadi semacam *habitus* bagi masyarakat Muhammadiyah yang identik dengan nalar rasional ilmiahnya.

Sementara itu, Persis pada awalnya menggunakan kitab *Sullamun Nayyirain* sebagai rujukan dalam menentukan Kalender Hijriah dan pada perkembangannya menggunakan kitab falak lain sebagai pembanding seperti *Fath ar-Rauf al-Manan* dan *al-Khulashah al-Wafiyah*. Pada tahun 1996 Persis mulai menggunakan metode *wujudul hilal* dan pada tahun 2002 Persis beralih menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh MABIMS sampai tahun 2012<sup>47</sup>.

Dalam rangka memberikan jalan tengah antara rukyat dan hisab, maka pemerintah melalui Kementerian Agama menggagas Kriteria Imkanurrukyat MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) yang mensyaratkan ketinggian hilal diatas 2 derajat, sudut elongasi 3 derajat dan umur bulan lebih dari 8 jam. Kriteria ini menjadi dasar dari penyusunan kalender Hijriah Pemerintah dan Taqwim Standar sekaligus sebagai sarana evaluasi atas laporan rukyat dari berbagai daerah pada saat sidang isbat untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Kriteria ini kemudian mendapat koreksi dari Thomas Djamaluddin dimana ketinggian hilal menjadi lebih dari 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat<sup>48</sup>.

#### D. Dinamika di Kalangan Elit Ormas dan Masyarakat Islam Indonesia

Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, tentunya nilai-nilai Islam sudah mempengaruhi kehidupan sosial umat Islam di Indonesia. Kalender Hijriyah, sebagai Kalender ibadah umat Islam, pada akhirnya juga terbawa dalam

---

puluh hari" (HR Bukhari dan Muslim). Lihat pula Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 192-201.

45 Rupi'i Amri, *Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah (Studi Atas Kriteria Wujud al-Hilal dan Konsep Mathla')*, *Jurnal at-Taqaddum* 4, no 1, (Juli 2012), 134-135. Baca Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 74-77.

46 Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, 122-123.

47 Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam melalui Kalender Islam", *Ahkam* 15, no 2, Juli 2015, 249-258.

48 Thomas Djamaluddin, "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global", Paper dipresentasikan dalam acara *Seminar Internasional Fikih Falak di Hotel Aryaduta Jakarta, 29-30 November 2017*.

dinamika sosial masyarakat Indonesia khususnya dalam hal penentuan awal bulan Hijriyah. Tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini masyarakat Indonesia masih terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda dalam hal penentuan awal bulan, yakni kelompok yang menganut metode hisab dan Kelompok yang menganut metode rukyat. Apabila mereka ditanya mengapa mereka memakai metode tersebut, maka mereka akan menjawab bahwa mereka sebenarnya tidak mengikuti hisab maupun rukyat, mereka hanya mengikuti ormas dimana mereka bernaung baik NU, Muhammadiyah maupun Persis. Mereka memberikan kepercayaan kepada ormas masing-masing dan mereka tidak ambil pusing dengan pilihan/ metode yang digunakan oleh ormas mereka<sup>49</sup>.

Dalam Perspektif Bourdieu, kondisi semacam ini lazim ditemui di lingkungan sosial manapun di seluruh belahan dunia. dalam sebuah sistem masyarakat, lingkungan dan kondisi sosial merupakan faktor utama dalam memberikan pengaruh pemikiran seseorang. Pengaruh-pengaruh tersebut kemudian diwujudkan melalui sikap nyata dan bahkan menjadi sebuah keyakinan ketika mereka berhadapan dengan permasalahan tertentu. keyakinan atau sikap tersebut sulit untuk dirubah karena hal tersebut sudah terbentuk melalui proses sosial yang panjang. Hal inilah yang menurut Bourdieu disebut dengan *habitus*. Oleh karena itu, adanya sikap berbeda masyarakat dalam merespon wacana kalender Hijriah ini merupakan bentuk dari sikap dan perilaku masyarakat yang terbentuk secara alami melalui pergaulan dan kondisi sosial di sekitarnya. Mereka yang sering bergaul dan secara kultural mengikuti NU akan secara jelas mengikuti metode rukyat yang digunakan oleh NU. Sebaliknya, mereka yang sudah lama berada di lingkungan Muhammadiyah akan secara total mengikuti sikap yang diambil oleh Muhammadiyah meskipun hal tersebut bertentangan dengan keputusan resmi dari pemerintah.

Seorang Antropolog, Andre Moller, dalam tulisannya menyebutkan bahwa fenomena penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa akan selalu menimbulkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat khususnya pada penentuan awal dan akhir ramadhan. Dalam kajiannya, Moller menyebutkan bahwa ketegangan terjadi bukan pada saat masyarakat NU dan Muhammadiyah berkumpul bersama membahas Kalender Hijriyah. Ketika mereka berkumpul dalam forum diskusi, maka suasana di dalamnya akan terlihat tenang dan kondusif. Suasana berbeda akan tampak terlihat pada saat mereka berkumpul dalam naungan ormas masing-masing. NU akan mempertanyakan mengapa Muhammadiyah menggunakan hisab sementara di dalam al-Quran dan Hadits tidak ada kata-kata

---

<sup>49</sup> Andre Moller, *Ramadhan in Java: The Joy and Jihad of Ritual Fasting*, (Lund: Department of History and Anthropology of Religion, 2005), 264.

yang mendukung hisab. sementara Muhammadiyah juga akan mempertanyakan bagaimana bisa NU mempertahankan rukyat semata sedangkan pada saat yang bersamaan ilmu pengetahuan sudah semakin berkembang dan mendukung adanya hisab<sup>50</sup>.

Moller memberikan gambaran perbedaan dan ketegangan antar ormas ini pada penentuan awal Bulan Ramadhan 1422 H. Pada saat itu, Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa puasa akan dimulai pada hari Jum'at 16 November 2002 dengan bedasar pada posisi hilal yang sudah di atas ufuk pada satu hari sebelumnya. Sementara itu, NU dan Pemerintah masih menunggu hasil dari pengamatan hilal (*rukyyat*) yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. pada akhirnya pemerintah memutuskan bahwa puasa akan dimulai pada hari Sabtu 17 November 2002. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa NU dan Muhammadiyah akan memulai puasa pada hari yang berbeda. Yang menjadi menarik disini adalah bahwa Persis, yang menganut metode Hisab tidak mengikuti apa yang diputuskan Muhammadiyah sebagai sesama pengguna metode Hisab. Sebaliknya, Persis memilih untuk mengikuti Pemerintah dan NU karena mereka menganggap bahwa posisi hilal pada saat itu cukup kritis<sup>51</sup>. Fenomena ini pada akhirnya juga berdampak pada *ukhuwah Islamiyah*<sup>52</sup>.

Jauh sebelum peristiwa tersebut, ketegangan juga terjadi pada Idul Fitri 1969 dimana Muhammadiyah dan NU berbeda dalam menentukan awal bulan Syawal. Dilaporkan bahwa ketegangan ini sampai pada ketegangan fisik dan menimbulkan korban jiwa<sup>53</sup>. Namun demikian, ketegangan ini tidak sampai mengganggu substansi dari ajaran Islam itu sendiri dan masyarakat mulai belajar untuk dewasa dalam menyikapi perbedaan yang ke depan masih akan terus berlanjut.

Dinamika Sosial ini tidak hanya terjadi di Jawa. Sebuah keluarga kecil di kepulauan Riau juga menjadi saksi bagaimana penentuan awal bulan Hijriyah ini membuat bingung satu keluarga. Peristiwa ini terjadi pada penentuan akhir ramadahn 1432 H, atau tahun 2011. Saat itu, satu keluarga sudah menyiapkan hidangan khas Lebaran karena mereka yakin besok sudah lebaran. Namun, akhirnya mereka harus tertunduk lemas karena pemerintah, pada saat itu diwakili oleh Suryadharma Ali selaku menteri Agama, mengumumkan bahwa besok masih harus berpuasa Ramadhan karena *hilal* belum nampak di berbagai tempat observasi di Indonesia.

---

50 Andre Moller, *Ramadhan in Java: The Joy and Jihad of Ritual Fasting*, 352

51 Andre Moller, *Ramadhan in Java: The Joy and Jihad of Ritual Fasting*, 261-262.

52 Moller menceritakan bahwa ada fenomena unik terjadi pada awal ramadhan tahun 1422 H di sebuah masjid di Yogyakarta. Karena bertepatan dengan hari Jumat, maka umat Islam laki-laki akan melakukan sholat Jumat dan pada saat itu khutbah diisi oleh pegawai Kemenag tentang penetapan awal puasa. Pada saat selesai sholat jumat, sebagian dari Jamaah ada yang makan siang sementara yang lain hanya melihat karena mereka sudah berpuasa pada hari tersebut. selengkapnya lihat di Andre Moller, *Ramadhan in Java: The Joy and Jihad of Ritual Fasting*, 264.

53 Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, 5-6.

hal ini sempat menimbulkan perdebatan sengit dalam keluarga mereka dan mereka hampir memutuskan untuk mengikuti keputusan Muhammadiyah yang sudah memutuskan Lebaran pada hari esok. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti pemerintah (dan NU) karena mereka sudah turun temurun menjadi warga NU.<sup>54</sup>

Adanya perbedaan ini pada akhirnya akan menimbulkan dominasi simbolik di masyarakat. Tempat ibadah merupakan salah satu yang menjadi sarana dominasi ketika masyarakat merayakan Lebaran yang berbeda. Tempat ibadah yang diklaim sebagai “Masjid NU” akan melaksanakan shalat Ied sesuai dengan ketentuan NU, begitu juga dengan “masjid Muhammadiyah”. Adanya dominasi ini berakibat pada minoritas yang ada di sekitar tempat ibadah tersebut. Masyarakat Muhammadiyah pastinya akan merayakan di tempat yang jauh dari rumahnya karena masjid yang ada di dekatnya adalah “masjid NU” berbeda dalam pelaksanaan shalat Idul Fitri. Sebaliknya juga warga NU pasti akan melaksanakan shalat Idul Fitri yang jauh dari tempat tinggalnya manakala masjid di sekitarnya merayakan Idul Fitri pada hari yang berbeda<sup>55</sup>. Namun adanya dominasi ini sudah disikapi dengan cukup dewasa oleh masyarakat karena mereka merasa bahwa persaudaraan sesama muslim lebih utama. Mereka lebih menjunjung tinggi toleransi dan saling memahami daripada harus saling menghujat dan menyalahkan antar sesama muslim.

Selain Dinamika Sosial dari ketiga ormas di atas, di Banyumas juga terdapat dinamika menarik pada setiap perayaan Idul Fitri antara Islam penganut Aliran Aboge (Alif Rebo Wage) dengan umat Islam non Aboge. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Islam Aboge ini mempunyai metode tersendiri dalam menetapkan Kalender Hijriyah. Islam Aboge ini biasanya mendur 2-3 hari dari Kalender Hijriyah pada umumnya. Dalam setiap perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, umat Islam non-Aboge akan menghormati Islam Aboge dengan tidak berlebaran di depan Islam Aboge. Pada saat Islam Aboge merayakan Idul Fitri 2 hari setelahnya, baru kemudian umat Islam non Aboge menunggu pelaksanaan sholat Idul Fitri kaum Aboge sampai selesai dan memberikan ucapan selamat lebaran<sup>56</sup>. Kerukunan yang terbentuk di daerah ini merupakan sebuah cermin kedewasaan umat Islam Indonesia dalam menghadapi perbedaan dalam penentuan Kalender Hijriyah.

---

54 Selengkapnya bisa dibaca di Nicholas J. Long, “On The Islamic Authority of the Indonesia State: Responsibility, Suspicion, and Acts of Compliance”, *Journal of The Royal Anthropological Institute* 23, no 4, (Desember 2017), 709-726.

55 <http://www.nu.or.id/post/read/54903/beda-lebaran-warga-nu-senang-tetap-harmonis-dengan-muhammadiyah>, diakses pada 16 Februari 2018, 10:06 WIB.

56 Ahmad Sodli, “Dinamika Hubungan Antara Penganut Islam Aboge dengan Umat Islam Lainnya di Kabupaten Banyumas”, *International Journal Ihyat’ Ulum ad-Din* 28, no 2, 2016.

Dinamika sosial kalender Hijriyah ini sepertinya terjadi tidak hanya pada level akar rumput semata, melainkan juga pada pucuk pimpinan ormas Islam, khususnya NU dan Muhammadiyah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa posisi Menteri Agama sering menjadi jabatan strategis yang diincar oleh Ormas NU maupun Muhammadiyah. Meskipun tidak hanya sebatas wacana Kalender Hijriyah semata, namun isu ini merupakan salah satu isu yang menjadi alasan kuat kedua ormas ini bersaing dalam perebutan kursi Menteri Agama. Posisi ini menjadi jabatan strategis mengingat Menteri Agama mempunyai hak penuh dalam menentukan penanggung jawab sidang *isbat* dan peranagkatnya. Pada saat menteri Agama Orde baru dipegang oleh Munawir Syadzali, Kader Muhammadiyah, ketegangan kembali muncul ketika ia menggunakan metode Hisab dalam menentukan Awal Bulan Hijriyah dan meninggalkan rukyat<sup>57</sup>. Hal ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya (Menteri Agama dari kalangan NU) dimana mereka menggunakan metode rukyat dalam pengambilan keputusan. Bahkan mereka mengklaim sejak 1946-1970 pemerintah Indonesia selalu menggunakan metode rukyat dan menjadikan metode hisab hanya sebagai sarana pendamping saja. Adanya ketegangan antara kedua ormas tersebut pada akhirnya akan memunculkan sikap berbeda (*distinction*) terhadap penguasa manakala terjadi perbedaan hasil dalam perhitungan Kalender Hijriyah.

Tabel di bawah ini merangkum beberapa keputusan pemerintah tentang penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia dimana di dalamnya terdapat perbedaan sikap terhadap keputusan pemerintah tersebut baik dari NU maupun Muhammadiyah.

**Tabel 1<sup>58</sup>**  
**Perbedaan Sikap NU dan Muhammadiyah terhadap Keputusan Kementerian Agama tentang Idul Fitri**

Pemerintah	Muhammadiyah	NU	Menteri Agama
20 Juni 1985	20 Juni 1985	19 Juni 1985	Munawir Syadzali
5 April 1992	5 April 1992	4 April 1992	Munawir Syadzali
25 Maret 1993	25 Maret 1993	24 Maret 1993	Tarmizi Taher <sup>1</sup>
14 Maret 1994	14 Maret 1994	13 Maret 1994	Tarmizi Taher
30 Januari 1998	29 Januari 1998	30 Januari 1998	Quraish Shihab
6 Desember 2002	5 Desember 2002	6 Desember 2002	Said Agil Husin AM
24 Oktober 2006	23 Oktober 2006	24 Oktober 2006	M. Maftuh Basyuni

<sup>57</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, 216-217.

<sup>58</sup> Diadopsi dari Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. 51, 141

13 Oktober 2007	12 Oktober 2007	13 Oktober 2007	M. Maftuh Basyuni
31 Agustus 2011	30 Agustus 2011	31 Agustus 2011	Suryadharma Ali

Merujuk tabel di atas, jelas sekali terlihat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Menteri Agama mempunyai pengaruh kuat dalam penentuan awal bulan Hijriyah, khususnya Ramadhan, Syawal dan Idul Adha. Jika kita membaca data di atas, jelas terlihat bahwa apabila ada perbedaan terkait Idul Fitri, maka pemerintah akan mengambil sikap sesuai dengan ormas dimana menteri agama bernaung. Jika Menteri Agama dari NU, jika ada perbedaan Hari Raya, maka NU akan ikut pemerintah sementara Muhammadiyah akan memilih sikap berbeda dan begitu juga sebaliknya.

Jabatan Menteri Agama, dalam perspektif Bourdieu, merupakan *arena* pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan. Di dalam arena ini, baik NU maupun Muhammadiyah, terus bersaing dengan melibatkan kapital-kapital yang dimiliki seperti Kapital Sosial yang diwujudkan dengan adanya relasi dengan kekuasaan dan kapital budaya yang diwujudkan dengan pertarungan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan terkait Kalender Hijriah. Ormas yang mampu memenangi pertarungan di arena tersebut berhak atas posisi Menteri Agama dan mendominasi wacana Kalender Hijriah di level pemerintahan. Pertarungan ini tidak jarang menimbulkan konflik yang berakibat pada goyahnya semangat persatuan di antara masyarakat. Kontestasi ini terus berlanjut sampai sekarang karena posisi ini juga secara tidak langsung menunjukkan dominasi ideologis di level pemerintahan. Dominasi tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang diambil dan salah satu yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah kebijakan terkait penentuan awal bulan Hijriah.

Selanjutnya, adanya dominasi yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa dan duduk di kursi Menteri Agama secara tidak langsung juga akan memunculkan adanya kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik (*symbolic violence*) ini merupakan model dominasi kultural dan sosial yang berlangsung secara tidak sadar dalam kehidupan masyarakat yang meliputi diskriminasi terhadap kelompok/suku/rasa tertentu<sup>59</sup>. Dalam kasus ini, Muhammadiyah sering menjadi korban adanya kekerasan simbolik karena Muhammadiyah hanya mempunyai sedikit kader yang mampu duduk di jabatan Menteri Agama. Sedangkan NU, lebih banyak mendominasi jabatan ini karena kekuatan jaringan yang dimiliki di dalam politik nasional.

59 Richard Jenkins, *Key Sociologists: Pierre Bourdieu*, (London and New York: Routledge, 1992), 66.

Hal tersebut bukan berarti bahwa NU selamanya mampu mendominasi jabatan Menteri Agama. Zaini Ahmad Noeh saat mempresentasikan makalahnya pada Rapat Kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu secara terang-terangan mengatakan bahwa keputusan tentang penetapan awal bulan Hijriyah ini pada zaman Menteri Munawir Syadzali (Muhammadiyah) berbeda dengan pendahulunya<sup>60</sup>. NU seperti dianaktirikan oleh Muhammadiyah karena mereka hanya menggunakan metode hisab dan mengesampingkan metode rukyat yang sudah dilakukan NU selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, ketegangan psikologis antara NU dan Muhammadiyah kembali terasa setelah beberapa tahun sebelumnya sempat melaksanakan hari raya bersama tanpa adanya perbedaan.

Muhammadiyah malah lebih sering mendapatkan kekerasan simbolik dalam hal ini. Muhammadiyah seperti melaksanakan/merayakan idul fitri sendirian ketika sebagian umat Muslim (NU) lebih memilih ikut pemerintah ketimbang mematuhi apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah. Hal ini sudah terjadi berkali-kali dan Muhammadiyah seperti berjalan sendiri tanpa adanya empati dari pemerintah. Warga Muhammadiyah-pun seperti tampak asing ditengah-tengah masyarakat manakala mereka merayakan Idul Fitri lebih dahulu sedangkan yang lain masih melaksanakan puasa ramadhan hari ke-30. Puncak dari kekerasan simbolik yang diterima oleh Muhammadiyah adalah manakala Muhammadiyah menolak untuk hadir dalam Sidang Isbat (Sidang untuk menentukan awal bulan Hijriyah, khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) pada tahun 2012 untuk menentukan awal Ramadhan 1432 H. Muhammadiyah menolak untuk hadir karena dalam setiap pelaksanaan sidang isbat, pendapat atau gagasan Muhammadiyah selalu tidak mendapatkan respon yang positif dari pemerintah dan mereka merasa diintervensi dengan adanya sidang isbat tersebut<sup>61</sup>.

Berbagai paparan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa posisi Menteri Agama menjadi sumber konflik antar kedua ormas tersebut. Posisi ini menjadi *arena* pertarungan sengit antar kedua ormas yang tidak jarang menimbulkan konflik di tataran masyarakat. Melihat begitu krusialnya posisi ini, sebaiknya Menteri Agama dijauhkan dari pengaruh politik praktis yang sarat akan berbagai kepentingan. Dengan adanya sosok yang netral di kursi Menteri Agama, setidaknya konflik yang sudah cukup lama berlangsung ini akan sedikit mereda. Selanjutnya, Komunikasi

---

60 Irfan Zidny, *Sekitar Perbedaan Awal Syawal*, dimuat dalam *Siyar*, Kamis, 1 April 1993 sebagaimana dikutip dari Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, 138-139.

61 <http://nasional.kompas.com/read/2012/07/19/1328502/Muhammadiyah.Pastikan.Tak.Ikut.Sidang.Isbath>, diakses pada 10 Oktober 2017, 8.04 WIB.

interumental<sup>62</sup> (komunikasi birokratif) yang selama ini digunakan oleh Kementerian Agama dirubah ke komunikasi intersubjektif yang mampu membuka ruang-ruang dialog yang bebas dari dominasi dan pengaruh kekuasaan. Dengan demikian, posisi pemerintah lebih dekat sebagai fasilitator (bukan konseptor) yang mampu menjembatani berbagai macam perbedaan pendapat sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.

## E. Kesimpulan

Dinamika sosial yang terjadi di Indonesia khususnya dalam wacana Kalender Hijriah merupakan sebuah keniscayaan mengingat dalam penentuannya terdapat beberapa metode yang berbeda. Ormas-ormas Islam di Indonesia terdikotomi menjadi dua aliran besar, yakni aliran rukyat dan aliran hisab. Adanya dua aliran ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya dinamika sosial khususnya menjelang datangnya 3 bulan Ibadah yakni Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Menteri Agama memegang posisi strategis dalam menentuka sikap pemerintah dalam menetapkan hari raya sehingga posisi ini menjadi arena kontestasi antara NU dan Muhammadiyah untuk melegitimasi kepentingannya. Konflik yang terjadi antar kedua ormas tersebut sudah masuk pada tataran elit dan akar rumput yang berimplikasi pada rasa persaudaraan antar umat. Untuk meredakan konflik ini, Kementerian Agama perlu merubah pola komunikasi mereka dari komunikasi interumental kepada komunikasi intersubjektif yang cenderung netral dan bebas dari kepentingan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 2007, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Al-Jawi, M. Shiddiq, "Penentuan Awal Bulan Kamariyah Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional bertema Penentuan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia: Merajut Ukhuwah di tengah Perbedaan, tanggal 27-30 November 2008 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Al-Modarresi, S.M.T. & N.M. White, 2004, "Calendar Conversion for Real-time Systems", *Journal of Advances in Engineering Software*, Vol 35, 7 (Juli), 511-516.

---

62 Komunikasi Interumental adalah model komunikasi yang sifatnya menguasai. Komunikasi ini mengakibatkan rasa tertindas yang terwujud dalam ketidakmampuan dalam menyampaikan keinginan dan harapan. Richard Jenkins, *Key Sociologists: Pierre Bourdieu*, (London and New York: Routledge, 1992), 34.

- Azhari, Susiknan, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia melalui Kalender Islam," jurnal Ahkam XV, no 2, Maret 1994.
- \_\_\_\_\_, 2007, Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, cet. ke-2 Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- \_\_\_\_\_, 2012. Kalender Islam: Ke Arah Integrasi NU-Muhammadiyah. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam.
- Azhari, Susiknan, "Gagasan Menyatukan Umat Islam melalui Kalender Islam", Ahkam 15, no 2, Juli 2015.
- Bouedieu, Pierre, 1986. The Forms of Capital dalam Richardson (ed), Handbook of Theory of Research for The Sociology og Education. Connecticut: Greenword Press.
- \_\_\_\_\_, 1979, La distinction. Critique sociale de judgement. Paris: Minuit.
- \_\_\_\_\_, 1980, Le sens Pratique. Paris: Minuit
- \_\_\_\_\_, 1994. Raison Pratiques. Sur la theorie de l'action. Paris: Seuil
- Bardin, 1925, The Amazingly Accurate Calendar System of The Maya Indians, Journal of Scientific American University of Virginia, November, 312-315.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rahmadi, 2017. Mengenal Karya-Karya Ilmu Falak Nusantara: Transmisi, Anotasi dan Biografi. Yogyakarta: LKiS.
- Djamaluddin, Thomas, "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global", Paper dipresentasikan dalam acara Seminar Internasional Fikih Falak di Hotel Aryaduta jakarta, 29-30 November 2017
- \_\_\_\_\_, "Re-evaluation of Hilal Visibility in Indonesia", Warta LAPAN 2, no 4, Oktober 2000
- Fauzi Fashri, 2014. Pierre Bourdieu, Mengungkap Kuasa Simbol, Yogyakarta: Jalasutra
- Feener, Michael, 2007, Muslim Legal Thought in Modern Indonesia, New York: Cambridge University Press.
- Hanapi, Mohd Syukri & Shahir Akram Husain, "Basis for Using Rukyah Method for Determining the Arrival of Ramadhan and Syawal in Brunei Darussalam". Journal of Islamic Studies and Culture 3 no 2 (Desember 2015): 13-15.
- Hariwijaya, 2002, Islam Kejawaen, Yogyakarta: Gelombang Pasang
- Haryatmoko, "Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa", dimuat dalam Majalah BASIS nomor 11-12 Tahun ke-52, November-Desember 2003.

- \_\_\_\_\_, 2016. *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, Yogyakarta: Kanisius
- Huttenbach, Henry R, *The Reconstruction and Evaluation of A Social Calendar As Primary Source for The History of The Jewish Community of Worms*, *Journal of World Union of Jewish Study*, Juni 2014, 367-397.
- Izzuddin, Ahmad, 2003, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia*, Yogyakarta: Logung
- \_\_\_\_\_, 2012, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Pitra.
- Jayusman, “Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia”, *MADANIA 2*, Vol 18, (Desember 2014), 185-187
- Jenkins, Richard, 1992, *Key Sociologists: Pierre Bourdieu*, London and New York: Routledge
- Khazin, Muhyiddin, 2004. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Perhitungan, Arah Kiblat, Waktu Sholat, Awal Bulan, dan Gerhana), Ypgyakarta: Buana Pustaka.
- LF-PBNU, 2006, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdhatul Ulama*, Jakarta: LF-PBNU
- Liow, Joseph Chinyong, 2009. *Piety and Politics: Islamism in Contemporary Malaysia*, New York: Oxford University Press.
- Longstaff, Alan. *Calendars from Arround the World*, London: National Maritime Museum, 2005.
- Long, Nicholas J., “On The Islamic Authority of the Indonesia State: Responsibility, Suspicion, and Acts of Compliance”, *Journal of The Royal Anthropological Institute* 23, no 4, (Desember 2017)
- Mukhijab, “Muhammadiyah-NU Memanaskan Proses Politik”, *Pikiran Rakyat*, September 12, 2014. Diakses 29 Oktober 2017. <http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2014/09/12/296630/muhammadiyah-nu-memanaskan-proses-politik>.
- Moller, Andre, 2005. *Ramadhan in Java: The Joy and Jihad of Ritual Fasting*, Lund: Department of History and Anthropology of Religion.
- Nafi’, Muhammad Zidni, “Beda Lebaran, Warga NU Senang tetap Harmonis dengan Muhammadiyah”, Oktober 05, 2014. Diakses 16 Februari 2018. <http://www.nu.or.id/post/read/54903/beda-lebaran-warga-nu-senang-tetap-harmonis-dengan-muhammadiyah>
- Nawawi, Abdul Salam, 2010, *Ilmu Falak*, Sidoarjo: Aqoba Press.
- Odeh, Mohammad SH, 2006, *New Criterion for Lunar Crescent Visibility*, *Journal of Experimental Astronomy*, Vol 18, September, 39-64

- Porter, Donald J, 2002, *Managing Politics and Islam in Indonesia*, New York and London: RoutledgeCurzon
- Revianur, Aditya, “Muhammadiyah Pastikan Tak Ikut Sidang Isbat ”, Kompas, Juli 19, 2012. Diakses 10 Oktober 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2012/07/19/1328502/Muhammadiyah.Pastikan.Tak.Ikut.Sidang.Isbat>.
- Rey, Terry, 2007. *Bourdieu on Religion: Imposing Faith and Legitimacy*, London and New York: Routledge.
- Ritzer, George, 2007. *Modern Sociological Theory, Seventh Edition*, California: McGraw Hill Education
- Rupi'i Amri, “Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariyah Menurut Muhammadiyah (Studi Atas Kriteria Wujud al-Hilal dan Konsep Mathla’ )”, *Jurnal at-Taquaddum* 4, no 1, Juli 2012
- Saifullah, 2010. *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saksono, Tono, 2007, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita.
- S. Segan, “Uncertainties and Misconcepts About Calendars: A Project of A Non-Historical Calendar”, *Publication of Astronomical Observation Belgrade*. No 80. 2006. 233-234
- Sodli, Ahmad, “Dinamika Hubungan Antara Penganut Islam Aboge dengan Umat Islam Lainnya di Kabupaten Banyumas”, *International Journal Ihya' Ulum ad-Din* 28, no 2, 2016.
- Sudibyoy, Muh Ma'rufin, “Observasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal”, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24, no 1, April 2014.
- Stingl, Alexander, 2009, *The Biological Vernacular from Kant to James, Weber and Parson*, Lampeter: Mellen Press
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Xin, Leong Wen, 2001. *Lunar Visibility and the Islamic Calendar*. Singapore: National University of Singapore.